

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR BUKU ATAU REFERENSI

- Apeldoorn, Van. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly dan Muhammad Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2004. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelemntasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media.
- Bastian, Radis. 2015. *Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Bruggink. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa Bernard Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Busroh, Abu Daud dan Abu Bakar Busro. 1985. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djamaluddin, M. Amin. 2016. *Fakta Dan Data Ahmadiyah Menodai Islam*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam.
- Fauzan, Muhammad. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Purwokerto: STAIN Press.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kelsen, Hans. 2014. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Khanif, Al. 2010. *Hukum & Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Lubis, Solly. 2009. *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Bandung: Mandar Maju.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. *Jurnal Konstitusi Volume 7*. Jakarta: Sekretaria Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- _____. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku VIII: Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Majelis Ulama Indonesia. 1980. *Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1980*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Ulama Indonesia
- _____. 2005. *Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/MUNAS VII/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Ulama Indonesia
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- MD, Mahfud. 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- _____. 2010. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2011. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muchsin. 2004. *Ikhtisar Sejarah Hukum*. Jakarta: IBLAM
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Palguna, I Dewa Gede. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Praja, Juhaya S. 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pramuko, Yudi. 2005. *Raport Merah Jaringan Islam Liberal, Hartono Ahmad Jaiz dkk & Ahmadiyah*. Jakarta: Taj Mahal Corporation.

- Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi. 2015. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media.
- Prayitno, Kwat Puji. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Kanwa Publisher.
- Rasjidi, Lili dan Ida Bagus Wyasa Putra. 2012. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Fikahati Aneska.
- S, Otje Salman dan Anton F. Susanto. 2008. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.
- Sibuea, Hotma Pardomuan. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- Sidharta, Bernard Arief. 2013. *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sidik, Munasir. 2008. *Dasar-Dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia*. Jakarta: Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
- Sinaga, Budiman N.P.D. 2005. *Hukum Konstitusi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemantri, Sri. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Yogyakarta: Rajagrafindo.
- _____. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Starke, J. G. 2008. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiharto, Umar Said. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaiman, King Faisal. 2017. *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Tim Penyusun Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2013. *Pedoman Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Wheare, K. C. 1996. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Bandung: Nusa Media.

Zulkarnain, Iskandar. 2005. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.

SUMBER INTERNET

- Kebebasan Beragama Dalam Negara Pancasila, <https://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2016/08/22/kebebasan-beragama-dalam-negara-pancasila-perspektif-hukum-dan-hak-asasi-manusia/>, diakses pada Selasa 9 Mei 2017 pukul 19.45
- Masjid Ahmadiyah di Kendal Dirusak Massa Tak Dikenal, <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/23/11224741/masjid.ahmadiyah.di.kendal.dirusak.massa.tak.dikenal>; diakses pada Rabu, 25 Mei 2016 pukul 21:00
- Siapkan RUU Perlindungan Kehidupan Beragama, Ini Lima Isu Yang Diangkat Pemerintah, <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/10/15145061/Siapkan.RUU.Perlindungan.Kehidupan.Lima.Beragama.Ini.Lima.Isu.yang.Diangkat.Pemerintah>; diakses pada Rabu, 25 Mei 2016 pukul 21:10
- Negara Yang Pernah menjajah Indonesia, <http://www.awas-aja.com/2016/04/6-negara-yang-pernah-menjajah-indonesia.html>, diakses pada Kamis, 20 Juli 2017 pukul 11.15

NORMA HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR Nomor XX Tahun 1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

TAP MPR Nomor III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1/ PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultur Right* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 & 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan